****

ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI, POLITIK, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA TAHUN 2017-2019

 **Ecces**

**Economics Social and Development Studies**

**Cyntia Dwi Lestari1,\***

**Farida Rahmawati 2**

1,2 Universitas Negeri Malang

1, 2 JL. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

E-mail: tyacyntia20321@gmail.com

(Article history) Received: xxx, Revised: xxx, Accepted xxx, Available online xxx

DOI:xxxxxxxxx, Stable URL: xxxxxxxxx

**Abstraksi:**

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi bersifat jangka panjang. Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah ialah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan semua akses ekonomi bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta tersebut. Dalam perspektif pengukuran kualitas pertumbuhan ekonomi, selain dengan melihat capaian indikator ekonomi dan sosial, ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui nilai dari Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif atau Inclusive Growth Index (IGI). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan baik pada level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Akan tetapi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara inklusif tidaklah mudah. Banyak faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penellitian ini yaitu kuantitatif deskriptif dengan model dan teknik analisis regresi panel dengan menggunakan stata. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa teknologi dan sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017 hingga 2019. Sedangkan politik berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017 hingga 2019. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui juga bahwa teknologi, politik, dan sumber daya manusia secara bersama – sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017 hingga 2019.

**Kata Kunci:** *pertumbuhan ekonomi inklusif; teknologi; politik; dan sumber daya manusia*

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Semua negara menginginkan peningkatan standar hidup bagi seluruh masyarakatnya, tidak terkecuali di Indonesia dengan cara mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang dimiliki kemudian menyusun rencana – rencana pembangunan dan melaksanakannya melalui partisipasi seluruh masyarakat guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi bersifat jangka panjang. Pada hakekatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan hanya sebagai sarana dalam mencapai kesejahteraan saja, akan tetapi pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara nasiaonal di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak menjamin semua warga di suatu negara tersebut mendapatkan manfaat yang sama. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan dimana terjadi kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB). PDB diartikan sebagai nilai kesuluruhan semua barang dan jasa yang diproduksikan di suatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahun) tanpa memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. Berikut merupakan data Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di Indonesia:

Tabel 1.1 PDRB Per Kapita Tahun 2017 – 2018:

 Sumber: Data BPS

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa PDRB tiap provinsi di Indonesia secara rata – rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku 51.881,20 naik hingga mencapai angka 55.986,86 pada tahun 2018 (satuan ribu rupiah). Hal ini menjadi tolak ukur dan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi dikatakan baik apabila hal tersebut tidak bersifat sementara, akan tetapi berjalan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah ialah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan semua akses ekonomi bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta tersebut (H. Hill, 2013). Artinya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak ada diskriminasi latar belakang sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat, sehingga memungkinkan seluruh masyarakat dalam berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah pertumbuhan dan pembangunan di suatu negara tersebut berkualitas atau tidak.

Dalam perspektif pengukuran kualitas pertumbuhan ekonomi, selain dengan melihat capaian indikator ekonomi dan sosial, ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui nilai dari Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif atau Inclusive Growth Index (IGI). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan baik pada level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur pembangunan di Indonesia melalui 3 pilar yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia di masa sekarang, pertumbuhan ekonomi inklusif selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti halnya teknonologi. Perkembangan berbagai macam teknologi mengakibatkan perubahan di segala bidang. Terdapat banyak negara maju maupun berkembang yang berlomba – lomba dalam meningkatkan teknologi guna meningkatkan efektivitas dan produktifitas output mereka agar perekonomian negara tersebut bisa meningkat dan mencapai hasil yang maksimal. Akan tetapi, hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya modal dan tenaga kerja yang saling mendukung terhadap kemajuan teknologi tersebut.

Dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, istlah teknologi memiliki makna yang spesifik. Teknologi adalah cara bagaimana input dalam berproduksi ditransformasikan menjadi output. Perbedaan tingkat teknologi memberikan pengertian kita dalam perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah (Sianturi, P 2017 ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan teknologi dapat mempangaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/daerah. Perkembangan teknologi dapat diterima secara luas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, karena teknologi memungkinkan produsen dapat memproduksi lebih banyak dengan tingkat input yang sama.

Di Indonesia sendiri terdapat ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah yang biasa disebut sebagai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi mampu mengukur ukuran pembangunan TIK, kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimum. Berikut merupakan nilai IP – TIK tiap provinsi di Indonesia tahun 2017:

Sumber: Publikasi BPS

Menurut data BPS IP-TIK Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan skala 0 sampai 10, IP-TIK Indonesia tahun 2018 sebesar 5,07 yang meningkat dibanding IP-TIK tahun 2017 sebesar 4,96. Secara umum, nilai IP-TIK provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018. Provinsi dengan IP-TIK tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu 7,14 di tahun 2018. Nilai ini meningkat dari IP-TIK 2017 sebesar 6,95. Sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah adalah Papua, yaitu sebesar 3,30 di tahun 2018, menurun dari 3,50 di tahun 2017.

Penelitian ini mencoba memperhitungkan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, yaitu faktor politik. Berlakunya Pemilu merupakan ciri paling dasar dan penting dari sebuah negara Demokrasi seperti Indonesia yang menandai adanya kebebasan politik. Hal ini menjelaskan bahwa reformasi mendorong terciptanya kebebasan politik. Berbagai indikator muncul untuk mengukur bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seiring dengan kemajuan kehidupan demokrasi di Indonesia, Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan dan menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi Indonesia adalah angka – angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai ukuran kestabilan politik mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting yaitu Indeks Kebebasan Sipil (IKS), Indeks Hak Politik (IHP), dan Indeks Lembaga Demokrasi (ILD) (Zahidaluthfa, 2018).

Diagram Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2011 – 2016:

 Sumber: BPS Indonesia

Data yang tertera pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011-2016 angka IDI mengalami fluktuatif, pada tahun 2011 - 2012 angka IDI cenderung meningkat yaitu dari 65,48 menjadi 77,72 namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 - 2013 angka IDI turun menjadi 63,72, kemudian naik lagi menjadi 73,04 pada tahun berikutnya. Pada tahun 2015 ke 2016 IDI mengalami penurunan kembali menjadi 70,09. Banyak hal yang mempengaruhi turunnya IDI, menurut peneliti LIPI Syarif Hidayat menyatakan bahwa adanya penurunan angka IDI salah satu penyebabnya adalah adanya dinamika politik didalam pemilu yang diselenggarakan, salah satu contohnya yaitu dinamika politik di DKI Jakarta (Zahidaluthfa, 2018).

Hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia pada dasarnya juga merupakan ukuran keberhasilan pembangunan dlihat dari aspek perkembangan demokrasi, karena pada hakikatnya pembangunan yang dilakukan baik secara nasional maupun daerah harus memberikan ruang demokrasi bagi warga negara baik di dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, maupun di dalam menikmati hasil – hasil pembangunan tersebut (Endy, 2016). Hasil pengukuran tersebut hanya akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa apabila dijadikan masukan bagi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang dapat mendorong kemajuan di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dapat dicapai apabila didukung dengan kepemilikan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang memiliki faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang aktif dalam mengelola akumulasi modal, menggali sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik untuk melaksanakan pembangunan. Sebagai salah satu dimensi dalam indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, Bappenas mengelompokkan sumber daya manusia ke dalam dimensi kapabilitas manusia.

Menurut Bappenas dalam mendefinisikan ekonomi inklusif perlu juga dilihat dari sisi penawaran (supply side). Hal tersebut bertujuan untuk menjamin apakah masyarakat yang bekerja telah memiliki kapabilitas sebagai seorang pekerja yang produktif, sehingga mampu mengambil keuntungan dari kesempatan ekonomi yang tersedia. Kapabilitas manusia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungannya.

Dalam penelitian ini, variabel yang menunjukkan kapabilitas manusia ialah Indeks Pembangunan Manusia atau dikenal Human Development Index (HDI). Ada tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan IPM yaitu, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan, dimana ketiga indikator tersebut saling berhubungan satu sama lain. Tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk. Semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia maka akan berakibat pada rendahnya produktivitas penduduk, begitu juga sebaliknya. IPM juga menjadi target dalam sasaran pembangunan wilayah. Pemerintah menargetkan pembangunan daerah semakin maju yang ditandai dengan peningkatan IPM pada daerah tersebut. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan ialah besaran Indeks Pembangunan Manusia di setiap daerah berbeda, sehingga IPM menjadi salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

**KAJIAN LITERATUR**

**Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi sering kali dikaitkan dengan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama dalam hal ini adalah proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu rangkaian proses bukan hanya merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat saja, akan tetapi mampu memberikan potret mengenai perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu (Wijaya, 2017). Dalam hal jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai suatu indikator yang menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan penduduknya baik komoditas barang maupun jasa, dimana dalam hal ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemampuan tersebut tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang sesuai.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak dapat dihindari mengakibatkan bertambahnya pula kebutuhan konsumsi sehari – hari, oleh karena itu adanya peningkatan pendapatan sangatlah penting. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang apabila diabaikan secara terus menerus akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.pemenuhan dari sisi konsumsi dan kesempatan kerja tersebut hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDB secara terus menerus (Arif & Wicaksani, 2017).

**Konsep Pertumbuhan Inklusif**

Pertumbuhan inklusif (inclusive growth), merupakan pertumbuhan yang kondusif untuk meningkatkan ukuran dan kemampuan ekonomi kelas menengah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diiringi dengan pertumbuhan kelas menengah secara signifikan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai ukuran apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan pertumbuhan yang berkualitas. Berkualitas dalam hal mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerusakan sumber – sumber daya alam dan lingkungan (H. Hill, 2013).

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan inklusif apabila pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja (Gupta et al., 2015). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang meluas antarsektor atau intensif terhadap tenaga kerja. Dengan begitu pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang pro poor. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian. Berdasarkan kedua fokus tersebut, pertumbuhan inklusif dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan (mengurangi disparitas antarkelompok) (Kakwani & Pernia, 2000).

**Konsep Teknologi**

Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, techne yang berarti ‘keahlian’ dan logia yang berarti ‘pengetahuan’. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada obyek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi: pengertian sistem, organisasi, juga teknik (Tajerin, 2007). Jadi teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia.

**Konsep Politik**

Politik adalah sebuah kajian yang memiliki hubungan dengan konsep penentuan tujuan dari politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dan segala resiko serta konsekuensi yang harus ditanggung. Ada juga yang mendeskripsikan teori politik sebagai sebuah model untuk menjelaskan bagaimana sebuah kekuasaan dalam negara bekerja. Kestabilan politik adalah hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan kestabilan politik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui sebuah institusi politik, dimana institusi politik akan menjadi indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Institusi bertugas untuk mengatur tentang hak milik seseorang atas barang dan jasa, mengatur dan mengendalikan redistribusi pendapatan secara merata serta sistem pemerintahan yang diterapkan pada sebuah negaranya yaitu negara demokrasi. Demokrasi erat kaitannya dengan rakyat. Demokrasi berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara.

**Konsep Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan semua manusia yang terlibat di dalam suatu orgnisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. (Ramadhan & Setiadi, 2019) membagi pengertian sumber daya manusia menjadi dua, yaitu secara makro dan mikro. Secara makro, sumber daya manusia adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan. Sedangkan secara mikro, sumber daya manusia secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut pegawai, karyawan, pekerja, dan lain – lain.

**METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh bersumber dari Publikasi Online dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bappeda. Olah data dilakukan dengan menggunakan aplikasi stata. Dalam penelitian ini variabel dependen (terikat) yang digunakan yaitu data Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indoensia (Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif) tahun 2017-2019, sedangkan untuk variabel independen (bebas) menggunakan data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP – TIK), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 hingga 2019.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel Perbandingan Estimasi Panel Data Model CEM, FEM, REM LM dan REM GLS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **CEM** | **P > t** | **FEM** | **P > t** | **REM (GLS)** | **P > t** |
| **IPTIK** | 0,2093214 | 0,017 | 0,2167517 | 0,021 | 0,2093214 | 0,015 |
| **IDI** | 0,0082058 | 0,181 | 0,0082024 | 0,186 | 0,0082058 | 0,178 |
| **IPM** | 0,1060652 | 0,000 | 0,1053685 | 0,000 | 0,1060652 | 0,000 |
| **Cons** | -3,305663 | 0,000 | -3,384553 | 0,000 | -3,395663 | 0,000 |
|  | R-sq | 0,8044 | R-sq | 0,8044 | R-sq | 0,8044 |

Sumber : Data Sekunder Diolah

 Dalam penelitian regresi data panel ini terdapat tiga model diantaranya yaitu Commont Effect Model, Fixed Effect Model,dan Random Effect Model. Akan tetapi, hanya ada satu model saja yang nantinya akan digunakan sebagai metode analisis. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk mendapatkan model manakah yang terbaik.

**Uji Hausman**



Sumber: Data Sekunder Diolah

Uji Hausmen Test dilakukan guna menentukan model yang paling tepat diantara Fixed Effect atau Random Effect yang mana nantinya akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Dari hasil running data di atas, diperoleh nilai Prob>chi2 sebesar 0,6672 dimana lebih besar dari pada alfa 5%. Artinya, model REM lebih baik daripada model FEM.

**Uji Chow**



Sumber: Data Sekunder Diolah

Uji Chow Test dilakukan untuk menentukan model yng paling tepat antara Fix Effect Model dengan Commont Effect Model yang nantinya akan digunakan dalam mengestimasi model panel data. Dalam hasil Uji Chow di atas dapat diketahui Prob > F sebesar 0,000 dimana kurang dari Alfa 5%. Artinya, Model FEM lebih baik daripada Model CEM.

**Hasil Uji Breusch & Pagan Lagrangian**



Sumber: Data Sekunder Diolah

Uji Hausmen Test dilakukan guna menentukan model yang paling tepat diantara Random Effect Model atau Common Effect Model yang mana nantinya akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Dari hasil running data di atas, diperoleh nilai Prob>Chibar2 sebesar 0,0000 dimana kurang dari alfa 5%, sehingga model yang dipilih ialah REM daripada CEM.

Dari ketiga uji di atas, diperoleh model terbaik ialah Model REM.

**Tabel Random Effect Model**



Sumber: Data Sekunder Diolah

**Koefisien Determinasi (R2)**

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan model regresi yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel dependennya. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai R square sebesar 0,8044. Artinya, total variasi Indeks Pembangunan Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019 mampu dijelaskan oleh variabel – variabel independen IP-TIK, IDI, dan IPM sebesar 80,44%, sedangkan sisanya 19,56% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F Simultan menunjukkan Prob > chi2 sebesar 0,0000 dimana lebih kecil daripada alfa 5%. Artinya, semua variabel independen (IP-TIK, IDI, dan IPM) secara bersama – sama mampu menjelaskan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif) dan berpengaruh secara signifikan.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan inklusif apabila pembangunan tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan, menjamin pemerataan akses dan kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Hal tersebut tentunya sulit untuk dicapai, karena ekonomi inklusif dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif diantaranya ialah teknologi, demokrasi, dan sumber daya manusia. Hasil dari pembahasan di atas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi, Eka 2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Anggraini, S.D, 2019) juga mendukung pernyataan di atas, yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Indeks Demokrasi memilik pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan hasil data estimasi Model REM di atas, diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

Y = -3,395663 + 0,2093214X1 + 0,0082058X2 + 0,1060652X3 + e

Persamaan regresi panel di atas menjelaskan bahwa:

1. **Pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019**

Variabel Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan (prob = 0,015 kurang dari alfa 5%) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019. Dimana apabila IP-TIK naik sebesar 1% maka, Indeks Inklusif akan naik juga sebesar 0,2093214%. Maksud dari kalimat tersebut ialah apabila indeks pembangunan teknologi, informasi, dan komunikasi meningkat (menunjukkan terjadinya perkembangan teknologi di Indonesia) maka pertumbuhan ekonomi iklusif dan berkelanjutan di Indonesia semakin mudah untuk dicapai.

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sudah memasuki era digitalisasi. Berbagai produk terkini mulai bermunculan sehingga menyebabkan istilah masyarakat modern bergeser dan terjadi perluasan makna menjadi masyarakat digital. Dulu pelayanan menggunakan kertas dan dokumen fisik lainnya, saat ini pelayanan diupayakan dalam bentuk paperless dan soft-file. Belum lagi ketika pelayanan harus melalui berbagai prosedur yang panjang dan cenderung berbelit, serta memakan waktu yang sangat lama. Akses dan penggunaan TIK terus mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur penunjang TIK. Secara umum terjadi peningkatan nilai IP – TIK provinsi di Indonesia dari tahun 2018 ke 2019. Penyedia jasa komunikasi mengalami kemajuan yang pesat, khususnya pada pelanggan telepon seluler. Penyedia layanan internet juga terlihat semakin luas. Pada tahun 2019 penetrasi internet berkembang daengan pesat di Indonesia yaitu dari 39,90 persen di tahun 2018 menjadi 47,69 persen di tahun 2019. Hal tersebut dapat mendorong perkembangan penggunaan internet dalam aktivitas ekonomi atau fenomena digital economy.

Pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi tersebut antara lain didorong oleh semakin mudahnya aktivitas jual beli melalui berbagai platform, yang semakin memudahkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. “Salah satunya adalah aktivitas belanja daring atau e-dagang (e-commerce),” Aktivitas belanja daring tersebut dapat menghubungkan konsumen langsung dengan produsen, termasuk berbagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran bahwa peran perbankan dengan layanan E-banking menjadi sangat penting dan menjadi aktor utama dalam mempercepat pembentukan masyarakat digital. Dengan besarnya dana masyarakat yang tersimpan di industri perbankan, sebuah bank masih bisa meningkatkan aktivitas transaksi yang paperless di masa yang akan datang (Sianturi, P 2017).

Lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut teknologi digital dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Penerima manfaat terbesar dari perkembangan ekonomi digital adalah dunia usaha terutama UMKM, dan konsumen tentunya, sehingga hal tersebut dapat mewujudkan usaha pemerintah dalam menciptakan ekonomi inklusif. Adanya berbagai platform digital mulai dari penyediaan jasa hingga barang, telah berhasil menyerap lapangan kerja baru serta kesetaraan dan ketercakupan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu, penerapan Smart City di Indonesia mendorong penggunaan teknologi yang lebih baik. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun Smart City adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harafiah, smart city memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif. Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah paparan mendefinisikan Smart City sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan antara lain, menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun fondasi indonesia smart nation. Smart City adalah memberikan pelayanan menggunakan teknologi terkini dan pembangunan infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif pada seluruh masyarakat yang tinggal dikota (Sudaryono, 2014).

1. **Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019**

Variabel Indeks Demokrasi Manusia berpengaruh secara positif dan tidak signifkan (prob = 0,178 lebih dari alfa 5%) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019. Dimana apabila IDI meningkat sebesar 1% maka, Indeks Inklusif akan meningkat juga sebesar 0,0082058%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks demokrasi Indonesia berpengarruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Stabilitas politik merupakan syarat dasar terjadinya pembangunan secara kondusif, sehingga dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sistem demokrasi dapat menjamin terwujudnya good governence yang tercermin pada berfungsinya lembaga – lembaga politik seperti parlemen, pemerintah, institusi, penegak hukum, dan media massa secara efektif. Good governence merupakan prasyarat mutlak agar pemerntah dapat membuat dan menetapkan kebijakan publik untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan, memperluas pasar, dan meningkatkan ekspansi ekonomi. Engaruh demokrasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif mensyaratkan pemerintahan yang menerapkan prinsip dasar good governence yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegak hukum. Pemerintahan yang bersih tanpa korupsi akan menciptakan iklim yang kondusif bagi aktvitas bisnis, investasi, perdagangan, dan pergerakan modal yang kemudian akan mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Terdapat penelitian dahulu yang relevan mendukung pembahasan ini, menurut (Zahidaluthfa, 2018), menyatakan bahwa kestabilan politik di Indonesia yang digambarkan dengan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2011-2016 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa apablia tingkat kestabilan politik meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga. Penelitian lain yang mendukung pembahasan ini dilakukan oleh (Esthiningrum, Fabiola Rinda, 2017), yang menyatakan hasil estimasi dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara agregat menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara agregat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Artinya, semakin baik demokrasi di tingkat regional, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

1. **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019**

Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan (prob = 0,000 kurang dari alfa 5%) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019. Dimana apabila IPM bertambah 1% maka Indeks Inklusif juga akan meningkat sebesar 0,1060652%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Artinya, apabila indeks pembangunan manusia meningkat maka pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia semakin mudah untuk dicapai dan meningkat juga.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tentunya didukung oleh faktor sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Pembangunan modal sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menciptakan perekonomian yang kuat. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber – sumber pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga indeks tersebut membentuk suatu indeks pengukuran yang biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di Indonesia, prioritas pembangunan pemerintah yang dinyatakan dalam butir keliman Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa program seperti, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”. Dalam RPJMN 2015 – 2019 buku I, peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan melalui 4 sub agenda prioritas, yaitu:

* Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
* Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar
* Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat
* Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan manusia yang akan dicapai, pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja, dan lansia, meningkatkan pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Menurut Wahyudi, N & Kurniawan (2019) meningkatnya kualitas manusia dari ukuran IPM dengan indikator agregat dari kesehatan, pendidikan dan tingkat daya beli memang sangat relevan, sehingga setiap ada perubahan kenaikan nilai IPM yang signifikan akan memicu turunnya kemiskinan penduduk yang signifikan pula. Salah satu manfaat IPM adalah untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia. Komponen yang digunakan untuk mengukur IPM ialah pendapatan, kesehatan dan pendidikan (BPS, 2017). Hidayat (2014) mengatakan bahwa sektor pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan teori human capital (Schultz, 1961) yang menyatakan bahwa peningkatan pendidikan akan berdampak pada peningkatan produktivitas sehingga akan meningkatkan pendapatan yang nantinya akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Keterkaitan antara pendidikan dan kesehatan juga dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2011) bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesadaran akan kesehatan juga semakin baik. Selain itu, Sjafi’i dan Hidayati (2009) dalam (Fadila, R & Marwan, 2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan.

**KESIMPULAN**

Melalui perhitungan regresi data panel yang telah dilakukan mengenai pengaruh teknologi, politik, dan sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017 hingga 2019 diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, teknologi dengan indikator IP TIK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017 – 2019. Hal tersebut diperoleh dari hasil prob = 0,015 kurang dari alfa 5%. Dimana apabila IP-TIK naik sebesar 1% maka, Indeks Inklusif akan naik juga sebesar 0,2093214%. Kedua, politik dengan indikator IDI berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017 – 2019. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil prob = 0,178 lebih dari alfa 5%. Dimana apabila IDI meningkat sebesar 1% maka, Indeks Inklusif akan meningkat juga sebesar 0,0082058%. Ketiga, sumber daya manusia dengan indikator IPM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia tahun 2017 – 2019. Pernyataan tersebut terbukti dari hasil prob = 0,000 kurang dari alfa 5%. Dimana apabila IPM bertambah 1% maka Indeks Inklusif juga akan meningkat sebesar 0,1060652%. Dan yang terakhir, teknologi, politik, dan sumber daya manusia secara bersama – sama atau simultan, dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 – 2019. Hal tersebut terbukti dari uji R2 dan uji F yang menunjukan hasil nilai R square sebesar 0,8044. Artinya, total variasi Indeks Pembangunan Inklusif di Indonesia Tahun 2017 – 2019 mampu dijelaskan oleh variabel – variabel independen IP-TIK, IDI, dan IPM sebesar 80,44%, sedangkan sisanya 19,56% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Serta Uji F Simultan menunjukkan Prob > chi2 sebesar 0,0000 dimana lebih kecil daripada alfa 5%. Artinya, semua variabel independen (IP-TIK, IDI, dan IPM) secara bersama – sama mampu menjelaskan variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi Inklusif) dan berpengaruh secara signifikan

**DAFTAR RUJUKAN**

Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *Univrsity Research Colloquium*, 323–328.

Balai Statistik Daerah (BAPPEDA DIY) dan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. *Laporan Akhir BAPPEDA DIY*, III.

Endy. (2016). Pengaruh Indeks Demokrasi Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Fadila R, & Marwan (2020) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia

Gupta, J., Pouw, N. R. M., & Ros-Tonen, M. A. F. (2015). Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. *European Journal of Development Research*, *27*(4), 541–559. https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.30

H. Hill, M. E. K. and J. Z. (eds). (2013). Membangun Perekonomian Indonesia Yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, *39*(1), 247–262. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/319>

Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth? *Asian Development Review*, *18*(1), 1–16.

Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh Ipm, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, *6*(2), 255–285.

Pratiwi, Eka (2019) Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.2*

Ramadhan, R. R., & Setiadi, Y. (2019). Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *17*(2), 109–124. https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9797

Sianturi, P (2017) Peran Ekonomi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inspirasi.* Vol 8 No 2

Tajerin. (2007). Peranan Teknologi dalam Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah Pesisir Di Kawasan Timur Indonesia. *Journal Ekonomi Pembangunan*, *12*.

Wahyudi, N & Kurniawan (2019) Pengembangan Official Statistic Dalam Mendukung Implementasi Sustainable Development Goals. *Seminar Nasional Development Statistic*

Wijaya, S. (2017). Analysis of Factors Which Affecting the Economic Growth. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, *9*(1), 76–85. <https://doi.org/10.17977/um002v9i12017p076>

Zahidaluthfa, M. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi dan Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Skripsi UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA*